



**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN**  
**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM ACARA**  
**ANUGERAH KEARSIPAN TAHUN 2016**  
**DAN**  
**PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL TERTIB ARSIP**

Yang Saya Hormati:

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, **Bapak Asman Abnur**;
- Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus D.W. Martowardoyo
- Para Gubernur atau pejabat yang mewakili
- Para Kepala Lembaga/LPNK
- Bupati dan Walikota atau pejabat yang mewakili
- Para Direktur Utama BUMN atau pejabat yang mewakili
- Para Pejabat Eselon I Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Para Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Pejabat Fungsional Arsiparis yang saya banggakan;
- Hadirin dan Undangan Sekalian yang berbahagia,

**Assalaamu'alaikum Wr. Wb.**

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahNya kita semua dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-Saudara sekalian. Saya merasa berbahagia, karena pada malam ini saya berada di tengah-tengah Bapak/Ibu dalam rangka acara **PENGANUGERAHAN KEARSIPAN/ ANRI AWARD TAHUN 2016** kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri Terbaik Nasional dan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2016.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki makna dan nilai strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, yang lahir dan diciptakan oleh penyelenggara negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena

itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa akan menentukan nasib suatu bangsa dan negara. Dalam arsip memiliki makna dan nilai memiliki nilai kekinian (sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi) serta alat bukti dalam dalam proses penegakan hukum dan nilai kenangan (sejarah masa lalu sebagai memori kolektif bangsa).

Dalam Rencana strategis Nasional, ANRI memiliki peran dalam “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya”, dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”. Rencana strategis ini kemudian ditindaklanjuti dalam Renstra ANRI (2015-2019) yaitu membangun kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan visi perubahan arsip sbg pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa . Salah satu indikatornya adalah Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat. Dengan demikian diharapkan terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional

yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Keberhasilan penyelenggaraan kearsipan nasional tidak terlepas dari tepat atau tidaknya kebijakan kearsipan yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sebagai suatu lembaga kearsipan, ANRI tidak hanya bertanggungjawab untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, tetapi juga mendukung terselenggaranya *good governance* menuju pemerintahan yang lebih baik sebagaimana program nawacita dalam pemerintahan yang sekarang ini, melalui upaya pembinaan kearsipan yang terus menerus sehingga mampu menjadikan arsip sebagai informasi yang akuntabel dan dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparansi.

Pada saat ini kita telah memasuki tahun ke-dua pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, dimana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas utama dari prioritas pembangunan. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama mengandung makna bahwa keberhasilan program pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan

program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, ANRI harus berperan aktif untuk memastikan arsip-arsip yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu harus dapat menjamin penyelamatan bahan pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut untuk mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan. Arsip tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, melainkan juga bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen organisasi. Keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya mempengaruhi kinerja organisasi, karena arsip secara nyata dan berkelanjutan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan proses manajemen organisasi. Sebagai rekaman dari setiap aktivitas, arsip menjadi bukti kinerja dan bukti segala kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya arsip menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

## **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Sejak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan , sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh ANRI. Hasil pembinaan kearsipan oleh ANRI menunjukkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negera/Daerah cenderung meningkat, meskipun belum menggembirakan, karena belum sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan di bidang kearsipan.

Dalam upaya mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola arsip yang baik (tertib arsip), ANRI telah berupaya secara terus menerus untuk membangun, meningkatkan dan memberdayakan peran pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, khususnya arsip aset, arsip terjaga, arsip vital, yang didukung dengan sistem pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang didukung dengan empat pilar pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya pendukung lainnya.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI (monitoring dan evaluasi), menunjukkan bahwa dari 179 Lembaga Negara (K/L), 197 Perguruan tinggi negeri (PTN), 146 BUMN dan 34 pemerintah daerah provinsi dan 514 Kab/Kota yang mengelola arsip

dengan tertib baru sebagian kecil. Hal ini disebabkan daya dukung dan ketersediaan sumber daya kearsipan sangat terbatas, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana kearsipan. Tak dapat dipungkiri bahwa pengabaian terhadap pentingnya arsip harus dilihat sebagai ancaman terhadap hilangnya rekam jejak suatu bangsa, secara administrasi dikenal sebagai hilangnya bahan bukti pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyambut positif kepada Arsip Nasional Republik Indonesia yang terus menerus berupaya melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan.

Dari aspek kelembagaan (organisasi kearsipan) karena keberadaan Unit Kearsipan dan lembaga kearsipan di lingkungan lembaga negara dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Sedangkan aspek pendanaan, secara umum anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan secara nasional masih sangat terbatas/minim. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana kearsipan, masih sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut diperparah lagi, bahwa pelaksana kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah serta perguruan tinggi negeri serta BUMN sebagian besar dilakukan oleh

sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian di bidang kearsipan. alias bukan sebagai arsiparis. Langkah strategis yang telah diupayakan oleh ANRI terkait dengan kelembagaan daerah, ANRI secara intens dan sinergi dengan Kementerian dalam Negeri dalam rangka penataan kelembagaan di daerah harus terus dilanjutkan . Sedangkan terkait dengan sumber daya manusia kearsipan, khususnya arsiparis, dalam hal ini ANRI telah menyampaikan kepada Kementerian PANRB tentang kebutuhan nasional jabatan fungsional arsiparis secara nasional diproyeksikan sebanyak 143. 630 orang, yang akan mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada setiap unit kerja, unit kearsipan dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia (saat ini baru 23.241 orang). Dalam rangka memenuhi amanat dan semangat UU ASN untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan keinerja serta tuntutan global, arsiparis telah diupayakan untuk peningkatan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi, baik dalam bidang teknis tertentu maupun sertifikasi kompetensi dalam jabatan. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan moratorium penerimaan PNS, untuk menjawab kekeurangan Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri, kami telah mengupayakan membuka kembali penerimaan PNS dalam jabatan fungsional arsiparis melalui jalur inpassing. Disamping itu, ANRI mengusulkan agar dilakukan harmonisasi



dan sinkronisasi kegiatan kearsipan yang dilaksanakan dilaksanakan oleh jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum lainnya. Untuk mendukung tersedianya arsiparis yang berkompeten dan profesional secara nasional, diharapkan kepada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri serta Badan Usaha Milik negara untuk mengangkat dan meningkatkan kompetensi arsiparis pada setiap unit kerja, unit kearsipan dan lembaga kearsipan, sesuai dengan kebutuhan.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Menurut hemat saya, untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kita bersama terhadap pentingnya pengelolaan arsip, pemerintah harus segera mencanangkan “**Gerakan Nasional Tertib Arsip**” di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintahan Daerah, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri dengan harapan peran arsip dalam mengatasi masalah bangsa saat ini dan dimasa mendatang dapat diwujudkan. Untuk Kementerian/Lembaga, saya menginginkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu *pilot project* dari gerakan tersebut bersama-sama dengan pemenang ANRI Award tahun ini. Kemudian untuk Pemerintahan Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri, saya berharap kepada mereka yang

telah menjadi juara tahun-tahun sebelumnya dan kandidat juara tahun ini dapat dijadikan pilot project program nasional ini. Kepada arsiparis, saya mengharapkan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, agar dapat menghadapi tantangan tugas dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam era informasi dan digital ini. Dengan terpenuhinya /tersedianya sumber daya kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar tersebut, maka gerakan nasional tertib arsip bisa segera diwujudkan di negara kita tercinta ini.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, marilah berharap agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terutama yang termasuk sebagai pilot project dapat melaksanakan **Gerakan Nasional Tertib Arsip** menuju terwujudnya Negara Indonesia yang bersih, berdaulat dan bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sekian, dan terima kasih.

**Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.**

**Kepala**

**Dr. Mustari Irawan, MPA**